

LAPORAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024



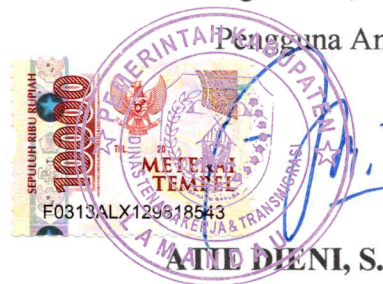
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nanga Bulik, Juni 2024

Pengguna Anggaran,



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19670630 198702 2 001



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna untuk saran dan masukan dari pihak yang terkait kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Nanga Bulik, Juni 2024

Pengguna Anggaran,



ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19670630 198702 2 001



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
NERACA	vii
LAPORAN OPERASIONAL	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	3
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KAUANGAN	4
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	4
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	4
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	5
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	5
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	5
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	6
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan	6
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	6
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	7
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset	8
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	8
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Ekuitas	9
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	10
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
5.1.1 Pendapatan	10
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	11
5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	11



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

5.1.1.3 Lain-lain PAD yang sah	11
5.1.2 Belanja	13
5.1.2.1 Belanja Operasi	13
5.1.2.2 Belanja Modal	16
5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	18
5.1.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	18
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	19
5.2.1 Aset	19
5.2.2 Kewajiban	26
5.2.3 Ekuitas	27
5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas	27
5.3 Kegiatan Operasional	28
5.3.1 Pendapatan-LO	28
5.3.2 Beban-LO	30
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	36
BAB VI PENUTUP	37



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 SPM TPP PNS Bulan Desember 2023
- Lampiran 1.2 SPM TPP PNS Bulan Desember 2022
- Lampiran 2 Tabel Perhitungan Beban/Belanja Dibayar Dimuka atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 3 Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan s/d Desember 2023
- Lampiran 4 Daftar Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 5.1 Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Audited Disnakertrans Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 5.2 Daftar Mutasi Aset Periode s/d Desember 2023
- Lampiran 5.3 Rekapitulasi Barang ke Neraca Periode 31 Desember 2023
- Lampiran 5.4 Laporan Rekapitulasi Penyusutan
- Lampiran 5.5 Daftar Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023
- Lampiran 6 Laporan Persediaan 31 Januari s/d 31 Desember 2023
- Lampiran 7.1 Kartu Inventaris Barang (KIB) A
- Lampiran 7.2 Kartu Inventaris Barang (KIB) B
- Lampiran 7.3 Kartu Inventaris Barang (KIB) C
- Lampiran 7.4 Kartu Inventaris Barang (KIB) D

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dibuat untuk menyediakan data informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, Laporan Keuangan SOPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan SOPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 295 Ayat 3.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Untuk menyampaikan data informasi secara terbuka dan jujur mengenai kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau selama satu tahun pada Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 262);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Anggaran Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

B. BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

C. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

D. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

E. BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

F. BAB VI PENUTUP

BAB II

INDIKATOR PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

BAB II

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dari program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 ini dilihat dari capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan terlihat trend yang cukup baik.

Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat aksesibilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan, juga dapat digambarkan bahwa yang dicapai cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Ini artinya pelaksanaan program dan kegiatan mampu dilaksanakan sesuai yang direncanakan yaitu tepat sasaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN

KINERJA KAUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisa pengukuran kinerja pada kegiatan menunjukkan bahwa skala pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2023 dinyatakan berhasil. Sedangkan nilai pencapaian sasaran juga dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil. Meskipun pengukuran kinerja maupun pencapaian sasaran dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil, namun dalam pelaksanaan operasionalnya masih ditemui beberapa masalah, akan tetapi masalah yang dihadapi tidak sampai mengganggu dan menghambat pelaksanaan operasional kegiatan.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

- a. Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2023 tidak dapat direalisasikan karen belum adanya penyesuaian terhadap PERDA IMTA.
- b. Terbatasnya anggaran, kualitas sumber daya manusia serta teknologi yang masih rendah. Permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan diantaranya kekurangan pegawai pelaksana dan masih terbatasnya pejabat yang menanganinya.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Kurangnya Bimbingan dan Pelatihan bagi pegawai yang mengakibatkan terkendalanya dalam proses penyelesaian pekerjaan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut laporan keuangan pemerintahan yang disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelapor. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau berperan sebagai entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamandau adalah basis akrual, untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO, beban dalam dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

a. Definisi

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lamandau, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Lamandau yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki hak atas pendapatan;

- Pemerintah Kabupaten Lamandau menerima kas yang berasal dari pendapatan;
- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

c. Pengukuran

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, dan khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU/SP2D Nihil.



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- Terjadinya Konsumsi Aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi, yaitu saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Lamandau, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Lamandau terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

b. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
- Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

a. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

c. Pengukuran

Nilai Aset diukur sebesar harga perolehannya.

- **Aset Lancar**

- **Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lamandau, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- **Aset tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

b. Pengakuan

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal

BAB V

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

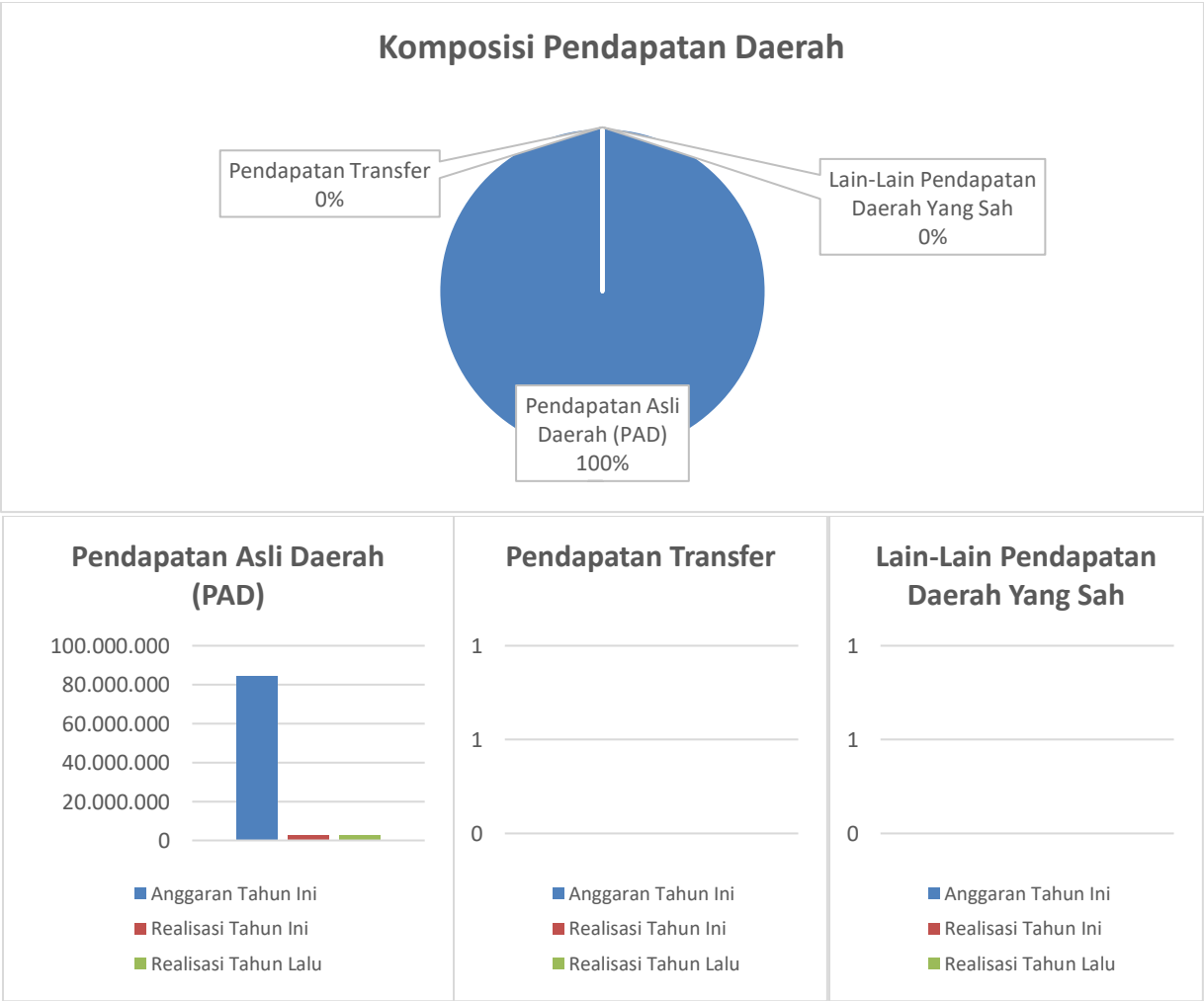
	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan	84.282.300,00	2.625.000,00	2.704.500,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.625.000,00 dan Rp2.704.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	84.282.300,00	2.625.000,00	3,11	2.704.500,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	84.282.300,00	2.625.000,00	3,11	2.704.500,00

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	84.282.300,00	2.625.000,00	2.704.500,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.625.000,00 dan Rp2.704.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	84.277.800,00	2.625.000,00	3,11	2.700.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Jumlah	84.282.300,00	2.625.000,00	3,11	2.704.500,00

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	84.277.800,00	2.625.000,00	2.700.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.625.000,00 dan Rp2.700.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.700.000,00	2.625.000,00	97,22	2.700.000,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	81.577.800,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	84.277.800,00	2.625.000,00	3,11	2.700.000,00

Penjelasan :

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
 - Terdapat penyewa yang belum melunasi sewa di bulan desember sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2023 tidak dapat direalisasikan karen belum adanya penyesuaian terhadap PERDA IMTA.
- Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5.1.1.3 Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	4.500,00	0,00	4.500,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.500,00, dengan rincian sebagai berikut:



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Jumlah	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Lain-lain PAD yang sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Tidak terdapat denda yang direalisasikan di Tahun 2023.
- Pemungutan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
 - Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.



5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja	4.752.253.381,00	4.601.739.636,00	5.386.675.575,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.601.739.636,00 dan Rp5.386.675.575,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

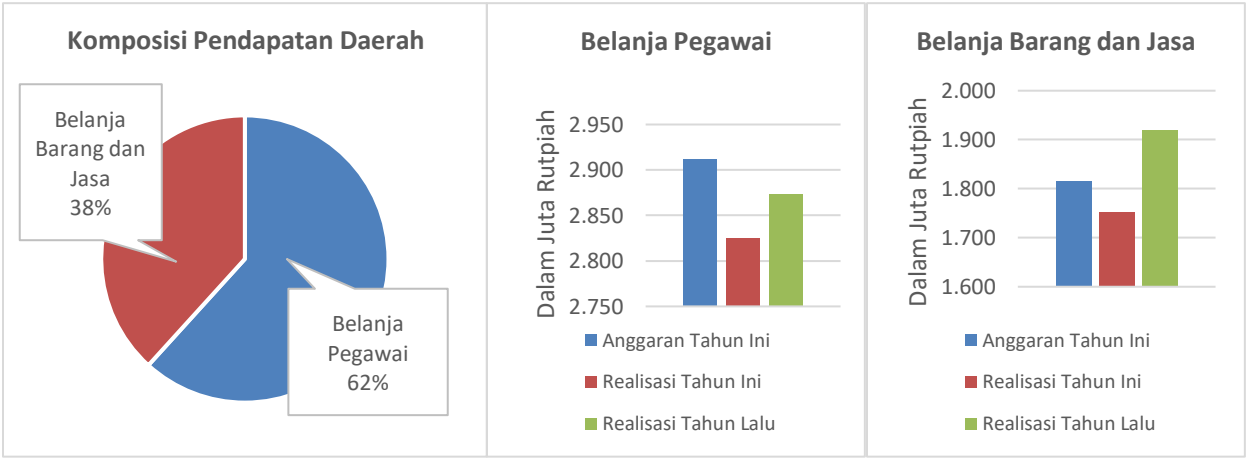
Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	4.727.253.381,00	4.576.989.636,00	96,82	4.791.753.380,00
BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	594.922.195,00
Jumlah	4.752.253.381,00	4.601.739.636,00	96,83	5.386.675.575,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Operasi	4.727.253.381,00	4.576.989.636,00	4.791.753.380,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.576.989.636,00 dan Rp4.791.753.380,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.912.712.186,00	2.825.608.909,00	97,01	2.872.982.613,00
Belanja Barang dan Jasa	1.814.541.195,00	1.751.380.727,00	96,52	1.918.770.767,00
Jumlah	4.727.253.381,00	4.576.989.636,00	96,82	4.791.753.380,00



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	2.912.712.186,00	2.825.608.909,00	2.872.982.613,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.825.608.909,00 dan Rp2.872.982.613,00, dengan rincian sebagai berikut:



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	1.213.773.561,00	1.179.033.420,00	97,14	1.190.367.940,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.823.516,00	98.515.886,00	97,71	105.292.892,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.383.750,00	160.270.000,00	96,91	166.750.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.691.000,00	26.040.000,00	97,56	24.025.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	66.733.220,00	64.960.740,00	97,34	66.336.720,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	74.003.272,00	73.470.869,00	99,28	75.367.033,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.353,00	16.608,00	35,83	15.207,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.257.097.514,00	1.216.501.386,00	96,77	1.244.827.821,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	6.800.000,00	83,33	0,00
Jumlah	2.912.712.186,00	2.825.608.909,00	97,01	2.872.982.613,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun sehingga menyebabkan realisasi TA 2023 lebih rendah;
 - Terdapat pegawai yang mutasi keluar dan masuk sehingga menyebabkan realisasi TA 2023 lebih rendah;
 - Terdapat tambahan honorarium untuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sehingga menyebabkan realisasi TA 2023 lebih tinggi.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Barang dan Jasa	1.814.541.195,00	1.751.380.727,00	1.918.770.767,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.751.380.727,00, dan Rp1.918.770.767,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	11.328.400,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.050.677,00	1.950.000,00	95,09	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.000.000,00	11.465.000,00	81,89	16.450.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.161.575,00	20.630.500,00	97,49	7.240.374,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	70.992.588,00	61.918.150,00	87,22	67.100.085,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.992.535,00	47.901.300,00	88,72	57.060.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.810.000,00	6.810.000,00	100,00	6.100.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.387.908,00	10.350.000,00	99,64	8.296.560,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.896.300,00	1.880.000,00	99,14	203.183.000,00



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.623.441,00	35.132.800,00	95,93	195.040.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	400.000,00	0,00	0,00	4.993.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	21.457.500,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	48.587.500,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	5.400.000,00	96,43	101.325.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67	6.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.313.000,00	149.095.834,00	93,59	158.549.506,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.172.000,00	62.089.795,00	99,87	57.425.563,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.956.000,00	22.956.000,00	100,00	22.920.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	20.724.000,00	20.724.000,00	100,00	20.688.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	79.431.600,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	22.764.254,00
Belanja Tagihan Listrik	37.800.189,00	36.447.227,00	96,42	28.429.660,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.000.000,00	24.113.592,00	92,74	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.700.000,00	5.901.800,00	76,65	5.363.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.035.840,00	21.484.944,00	97,50	20.104.439,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.106.142,00	1.499.952,00	71,22	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	1.525.386,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.800.000,00	4.900.000,00	50,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	38.130.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	420.000.000,00	416.629.398,00	99,20	0,00
Belanja Sosialisasi	5.600.000,00	4.500.000,00	80,36	81.600.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	8.400.000,00	84,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.420.000,00	71.377.900,00	99,94	38.190.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	21.500.000,00	21.411.500,00	99,59	11.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.050.000,00	99,18	7.250.000,00



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.995.000,00	50.834.500,00	99,69	58.829.930,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	470.092.000,00	467.397.451,00	99,43	380.134.410,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.512.000,00	133.045.500,00	92,07	97.821.850,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.100.000,00	7.433.584,00	91,77	0,00
Jumlah	1.814.541.195,00	1.751.380.727,00	96,52	1.918.770.767,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Karena keterbatasan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - Belanja bahan bangunan dianggarkan untuk kegiatan pameran, namun tidak dapat realisasikan di tahun 2023 karena dana tersedia di DPPA dan disahkan setelah kegiatan dilaksanakan;
 - Tidak adanya realisasi belanja pakaian dinas di tahun 2023 karena dana dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas;
 - Adanya penyesuaian nama akun sehingga ada realisasi belanja di tahun 2022 tetapi tidak ada realisasai di Tahun 2023 dan sebaliknya.

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal	25.000.000,00	24.750.000,00	594.922.195,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	561.955.945,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.966.250,00
Jumlah	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	594.922.195,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.750.000,00	561.955.945,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.750.000,00 dan Rp561.955.945,00.



Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	57.853.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.500.000,00	5.300.000,00	96,36	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	70.475.600,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	134.501.800,00
Belanja Modal Alat Pendingin	6.500.000,00	6.450.000,00	99,23	36.370.925,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	39.852.320,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	129.685.200,00
Belanja Modal Personal Computer	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	57.983.300,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	16.708.800,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	18.525.000,00
Jumlah	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	561.955.945,00

Penjelasan:

- 1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Realisasi belanja modal di Tahun 2023 menurun dikarenakan belanja di Tahun 2022 sudah banyak memenuhi kebutuhan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan belanja Tahun 2023 hanya untuk memenuhi belanja yang belum terpenihi di Tahun 2022

5.1.2.2.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	15.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.000.000,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Penjelasan:

- 1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Terdapat kegiatan rehabilitasi instalasi listrik kantor di tahun 2022 dan tidak terdapat di tahun 2023;
 - b. Belanja di Tahun 2022 sudah memenuhi kebutuhan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



5.1.2.2.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	17.966.250,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.966.250,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	17.966.250,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	17.966.250,00

- Penjelasan:
- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Belanja di Tahun 2022 sudah memenuhi kebutuhan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	4.667.971.081,00	4.599.114.636,00	5.383.971.075,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah				
✓ Pendapatan Asli Daerah	84.282.300,00	2.625.000,00	3,11	2.704.500,00
✓ Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
➤ Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	4.727.253.381,00	4.576.989.636,00	96,82	4.791.753.380,00
✓ Belanja Modal	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00	594.922.195,00
Jumlah	4.667.971.081,00	4.599.114.636,00	98,52	5.383.971.075,00

5.1.3.1 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023

Saldo Anggran Lebih Tahun 2023 sebesar (Rp 4.599.114.636,00)



5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp3.356.847.351,00, Kewajiban sebesar Rp91.392.069,00, dan Ekuitas sebesar Rp3.265.455.282,00

5.2.1 Aset

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	3.356.847.351,00	3.787.727.887,00

Total saldo Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.356.847.351,00 atau turun sebesar Rp430.880.536,00 dari tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	3.001.524,00	2.890.001,00	3,86	111.523,00
Aset Tetap	3.353.845.827,00	3.784.837.886,00	(11,39)	(430.992.059,00)
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.356.847.351,00	3.787.727.887,00	(11,38)	(430.880.536,00)

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	3.001.524,00	2.890.001,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.001.524,00 atau naik sebesar Rp111.523,00 dari dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.890.001,00 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	3.001.524,00	2.890.001,00	3,86	111.523,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.001.524,00	2.890.001,00	3,86	111.523,00

5.2.1.1.1Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	3.001.524,00	2.890.001,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.001.524,00, dan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.890.001,00,

Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Dibayar Di Muka	3.001.524,00	2.890.001,00	3,86	111.523,00
Jumlah	3.001.524,00	2.890.001,00	3,86	111.523,00



5.2.1.1.2Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	0,00	0,00

Saldo persediaan sebesar Rp 0,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2022		0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2023	198.037.750,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Belanja persediaan BOS/BLUD	0,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
9	Reklas dari peralatan dan mesin	0,00	
10	Beban ekstrakompentable	0,00	
11	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8+9+10)		198.037.750,00
12	Dikurangi:		
13	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	(0,00)	
14	Pengeluaran hibah persediaan	(0,00)	
15	Jumlah tambahan persediaan bersih (13+14)	(0,00)	
16	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+11+15)		198.037.750,00
17	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(198.037.750,00)
18	Persediaan tahun 2023 (16+17)		0,00

5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	3.353.845.827,00	3.784.837.886,00

Saldo Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.353.845.827,00, mengalami penurunan sebesar Rp430.992.059,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	1.402.269.000,00	1.402.269.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.569.043.334,90	3.544.293.334,90	0,70	24.750.000,00
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	3.853.715.136,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	906.890.364,00	906.890.364,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.378.072.007,90)	(5.922.329.948,90)	7,70	(455.742.059,00)
Jumlah	3.353.845.827,00	3.784.837.886,00	(11,39)	(430.992.059,00)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Saldo Awal 1 Januari 2023		3.784.837.886,00
Penambahan :		
Belanja Modal 2023	24.750.000,00	
Koreksi Pencatatan aset tetap	0,00	
Mutasi masuk dari SOPD	0,00	
Reklas dari belanja barang dan jasa	0,00	
Pembelian dari Dana BOS/BLUD	0,00	
Penambahan bukan pengadaan (Hibah)	0,00	
Reklas aset tetap di skpd	0,00	
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	
Jumlah Penambahan		24.750.000,00
Pengurangan :		
Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	0,00	
Reklas keluar ke ekstrakom	0,00	
Beban penyusutan	(455.742.059,00)	
Mutasi keluar ke SOPD lain	0,00	
Reklas aset tetap dan aset lainnya	0,00	
Penghapusan Aset Tetap dan Sapi karena terjual/mati	0,00	
Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu mobil)	0,00	
Jumlah Pengurangan		(455.742.059,00)
Jumlah (1+2-3)		3.353.845.827,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah		1.402.269.000,00	1.402.269.000,00

Saldo Aset Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.402.269.000,00 tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	1.402.269.000,00	0,00	0,00	1.402.269.000,00	0,00
Jumlah	1.402.269.000,00	0,00	0,00	1.402.269.000,00	0,00

Tanah	1.402.269.000,00
Penambahan :	
Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Tanah)	0,00
Hibah dari Desa Melata (Tanah Pasar)	0,00
Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Mutasi Masuk antar OPD	0,00
Jumlah Penambahan	0,00



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Pengurangan :	
Mutasi Keluar antar OPD	
Penghapusan	
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	1.402.269.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	3.569.043.334,90	3.544.293.334,90

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.569.043.334,90, mengalami kenaikan sebesar Rp24.750.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	3.544.293.334,90	0,00	24.750.000,00	3.569.043.334,90	24.750.000,00
Jumlah	3.544.293.334,90	0,00	24.750.000,00	3.569.043.334,90	24.750.000,00

Penambahan sebesar, Rp24.750.000,00 pengurangan sebesar (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	3.544.293.334,90
Penambahan :	
Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	24.750.000,00
Belanja modal dari dana bos /blud	0,00
Reklas masuk dari Belanja Barang & Jasa	0,00
Reklas masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00
Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Reklas masuk dari Aset Tetap Lainnya	0,00
Hibah dari Kementrian	0,00
Mutasi Masuk dari OPD lain	0,00
Koreksi pencatatan	0,00
Jumlah Penambahan	24.750.000,00
Pengurangan :	
Mutasi keluar ke SOPD lain	(0,00)
Reklas ke Barang Jasa	(0,00)
Reklas ke Gedung dan Bangunan	(0,00)
Reklas ke Aset lainnya (rusak berat)	(0,00)
Reklas keluar ke ekstrakompentable	(0,00)
Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat)	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	3.569.043.334,90

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	3.853.715.136,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.853.715.136,00, tidak ada perubahan dengan saldo tahun sebelumnya.



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00	0,00	0,00	3.853.715.136,00	0,00
Jumlah	3.853.715.136,00	0,00	0,00	3.853.715.136,00	0,00

Penambahan sebesar Rp0,00 dan pengurangan sebesar (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	3.853.715.136,00
Penambahan :	
Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	0,00
Reklas dari Belanja Barang Jasa	0,00
Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Reklas masuk dari Peralatan dan Mesin	0,00
Reklas masuk dari KDP	0,00
Hibah dari kementrian	0,00
Koreksi Saldo Awal (atas temuan BPK)	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
Reklasifikasi keluar ke Barang Jasa	(0,00)
Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	(0,00)
Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)
Reklas keluar ke KDP	(0,00)
Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud	(0,00)
Reklas keluar ke ekstrakompentable	(0,00)
Mutasi keluar antar SOPD	(0,00)
Penghapusan	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	3.853.715.136,00

5.2.1.2.4Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	906.890.364,00	906.890.364,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 906.890.364,00 tidak ada perubahan dari saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	906.890.364,00	0,00	0,00	906.890.364,00	0,00
Jumlah	906.890.364,00	0,00	0,00	906.890.364,00	0,00



Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan		906.890.364,00
Penambahan :		
Koreksi pencatatan saldo awal	0,00	
Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)	0,00	
Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00	
Reklasifikasi Masuk dari KDP	0,00	
Hibah jaringan listrik dari desa sukamaju dan desa sumber cahaya	0,00	
Mutasi Masuk dari OPD	0,00	
Jumlah Penambahan		0,00
Pengurangan :		
Reklas keluar ke Tanah	(0,00)	
Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)	
Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	(0,00)	
Reklas keluar ke KDP	(0,00)	
Reklas keluar ke barang jasa	(0,00)	
Reklas keluar ke Investasi Permanen	(0,00)	
Mutasi Keluar dari OPD		
Penghapusan	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		906.890.364,00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(6.378.072.007,90)	(5.922.329.948,90)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar (6.378.072.007,90) mengalami penambahan sebesar (455.742.059,00), dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	5.922.329.948,90	0,00	455.742.059,00	6.378.072.007,90	455.742.059,00
Jumlah	5.922.329.948,90	0,00	455.742.059,00	6.378.072.007,90	455.742.059,00

Penambahan sebesar (455.742.059,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(5.922.329.948,90)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(222.247.056,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(162.040.287,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(71.454.716,00)
Jumlah Penambahan	(455.742.059,00)



Pengurangan :		
• Penghapusan	0,00	
• Koreksi Salah Saji	0,00	
Jumlah Pengurangan		0,00
Jumlah (1+2-3)		(6.378.072.007,90)

5.2.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	0,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp 0,00, terdiri atas Aset Lain-lain. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya sebelum sebesar Rp 0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	205.500.000,00	205.500.000,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat dan obat expired. Saldo per 31 desember 2023 sebesar Rp205.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Aset Rusak Berat/Usang	205.500.000,00	205.500.000,00
dll	0,00	0,00
Jumlah	205.500.000,00	205.500.000,00

5.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp205.500.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp205.500.000,00.



Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)	0,00	(0,00)
Jumlah	(205.500.000,00)	(205.500.000,00)	0,00	(0,00)

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	91.392.069,00	99.311.578,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp91.392.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.919.509,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	91.392.069,00	99.311.578,00	(7,97)	(7.919.509,00)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	91.392.069,00	99.311.578,00	(7,97)	(7.919.509,00)

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	91.392.069,00	99.311.578,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp91.392.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.919.509,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	91.392.069,00	99.311.578,00	(7,97)	(7.919.509,00)
Jumlah	91.392.069,00	99.311.578,00	(7,97)	(7.919.509,00)

5.2.2.1.1 Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	91.392.069,00	99.311.578,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp91.392.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.919.509,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	91.392.069,00	99.311.578,00	(7,97)	(7.919.509,00)
Jumlah	91.392.069,00	99.311.578,00	(7,97)	(7.919.509,00)

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2022	91.392.069,00	99.311.578,00
Jumlah	91.392.069,00	99.311.578,00



5.2.3 Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	3.265.455.282,00	3.688.416.309,00

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.265.455.282,00 mengalami penurunan sebesar Rp422.961.027,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	3.265.455.282,00	3.688.416.309,00	(11,47)	(422.961.027,00)
Jumlah	3.265.455.282,00	3.688.416.309,00	(11,47)	(422.961.027,00)

5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban dan Ekuitas	3.356.847.351,00	3.787.727.887,00

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.356.847.351,00 mengalami penurunan sebesar Rp430.880.536,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	3.356.847.351,00	3.787.727.887,00	(11,38)	(430.880.536,00)
Jumlah	3.356.847.351,00	3.787.727.887,00	(11,38)	(430.880.536,00)



5.3 Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- 1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lamandau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

	2023	2022	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.625.000,00	2.704.500,00	(79.500,00)	(2,94)
Pendapatan Retribusi Daerah	2.625.000,00	2.700.000,00	(75.000,00)	(2,78)
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	4.500,00	(4.500,00)	(100,00)

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	2.625.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00
Jumlah	2.625.000,00

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SOPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.625.000,00, dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.700.000,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut :



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	2023	2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Retribusi PenyewaanTanah dan Bangunan	2.625.000,00	2.700.000,00	(2,78)	(75.000,00)
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.625.000,00	2.704.500,00	(2,78)	(75.000,00)

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Terdapat penyewa yang belum melunasi sewa di bulan Desember 2023 sebesar Rp 75.000,00;
 - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun 2023 tidak dapat direalisasikan karen belum adanya penyesuaian terhadap PERDA IMTA.
- Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini **sama** dengan saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.625.000,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
✓	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah untuk periode TA 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.500,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	2023	2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	4.500,00	(100,00)	(4.500,00)
Jumlah	00,00	4.500,00	(2,78)	(4.500,00)

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Tidak terdapat denda yang direalisasikan di Tahun 2023.
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini **sama** dengan saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp4.500,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
✓	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.3.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2023 sebesar Rp5.024.700.663,00 tahun 2022 sebesar Rp5.320.722.343,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

JENIS BEBAN	2023	2022
Beban Pegawai	2.817.689.400,00	2.872.948.966,00
Beban Barang dan Jasa	1.751.269.204,00	2.057.462.324,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.247.056,00	155.824.083,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	71.454.716,00	72.446.683,00
Jumlah	5.024.700.663,00	5.320.722.343,00

5.3.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023. Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp5.024.700.663,00 dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.320.722.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BEBAN	2023	2022
Beban Pegawai	2.817.689.400,00	2.872.948.966,00
Beban Persediaan	198.037.750,00	787.952.969,00
Beban Jasa	795.681.019,00	671.682.965,00
Beban Pemeliharaan	149.673.900,00	119.870.130,00
Beban Perjalanan Dinas	607.876.535,00	477.956.260,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.247.056,00	155.824.083,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	71.454.716,00	72.446.683,00
Jumlah	5.024.700.663,00	5.320.722.343,00

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.817.689.400,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp55.259.566,00, atau 1,92% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp2.872.948.966,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

Rincian Beban Pegawai tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022	Kenaikan Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Gaji Pokok PNS	1.179.033.420,00	1.190.367.940,00	(11.334.520,00)	(0,95)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	98.515.886,00	105.292.892,00	(6.777.006,00)	(6,44)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	160.270.000,00	166.750.000,00	(6.480.000,00)	(3,89)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.040.000,00	24.025.000,00	2.015.000,00	8,39
Beban Tunjangan Beras PNS	64.960.740,00	66.336.720,00	(1.375.980,00)	(2,07)
Beban Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	73.470.869,00	75.367.033,00	(1.896.164,00)	(2,52)
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.608,00	15.207,00	1.401,00	9,21
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.208.581.877,00	1.244.794.174,00	(36.212.297,00)	(2,91)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100,00
Jumlah	2.817.689.400,00	2.872.948.966,00	(55.259.566,00)	(1,92)

- Penjelasan:
- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban Pegawai tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 55.259.566,00 (1,92%). Penurunan ini diantaranya berasal dari jumlah pegawai pensiun dan pegawai mutasi keluar dan masuk.
 - Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp7.919.509,00 (Rp2.817.689.400,00 – Rp2.825.608.909,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	7.919.509,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023	99.311.578,00
✓	0,00
✓	0,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Desember 2022	91.392.069,00
✓	0,00
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	7.919.509,00

5.3.2.1.2Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.751.269.204,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp55.259.566,00 atau 2,69% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp2.057.462.324,00, dengan rincian sebagai berikut



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022	Kenaikan Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Persediaan	198.037.750,00	787.952.969,00	(589.915.219,00)	(74,87)
Beban Jasa	795.681.019,00	671.682.965,00	123.998.054,00	18,46
Beban Pemeliharaan	149.673.900,00	119.870.130,00	29.803.770,00	24,86
Beban Perjalanan Dinas	607.876.535,00	477.956.260,00	129.920.275,00	27,18
Jumlah	1.751.269.204,00	2.057.462.324,00	(55.259.566,00)	(2,69)

- Penjelasan:
3. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
- a. Beban Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp 589.915.219 (74,87%) diantaranya karena di tahun 2022 masih dalam masa pandemi covid-19 sehingga terdapat belanja dalam upaya memenuhi protokol kesehatan.
 - b. Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan beban Perjalanan Dinas mengalami peningkatan diantaranya karena status pandemi covid-19 sudah dicabut, sehingga tidak ada lagi pembatasan kegiatan.
4. Pengakuan Beban Baran dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp111.523,00(Rp1.751.269.204,00 – Rp 1.751.380.727,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	111.523,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Beban dibayar dimuka Tahun 2023	3.001.524,00
✓	0,00
✓	0,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Beban dibayar dimuka Tahun 2022	2.890.001,00
✓	0,00
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	111.523,00

5.3.2.1.2.1 **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp198.037.750,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp589.915.219,00 atau 74,87% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp787.952.969,00, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	11.328.400,00	(11.328.400,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.465.000,00	16.450.000,00	(4.985.000,00)	(30,30)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	20.630.500,00	128.977.674,00	(108.347.174,00)	(84,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.918.150,00	67.100.085,00	(5.181.935,00)	(7,72)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.901.300,00	57.060.850,00	(9.159.550,00)	(16,05)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.810.000,00	6.100.000,00	710.000,00	11,64



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.350.000,00	8.296.560,00	2.053.440,00	24,75
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.880.000,00	203.183.000,00	(201.303.000,00)	(99,07)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.132.800,00	195.040.000,00	(159.907.200,00)	(81,99)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	4.993.000,00	(4.993.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.457.500,00	(21.457.500,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Olahraga	0,00	48.587.500,00	(48.587.500,00)	(100,00)
Beban Persediaan Ekstrakomptabel	0,00	16.378.400,00	(16.378.400,00)	(100,00)
Jumlah	198.037.750,00	787.952.969,00	(589.915.219,00)	(74,87)

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp795.681.019,00 mengalami kenaikan sebesar Rp123.998.054,00 atau 18,46% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2022 sebesar Rp671.682.965,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	101.325.000,00	(95.925.000,00)	(94,67)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	6.750.000,00	(5.300.000,00)	(78,52)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	149.095.834,00	158.549.506,00	(9.453.672,00)	(5,96)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	62.089.795,00	57.425.563,00	4.664.232,00	8,12
Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.956.000,00	22.920.000,00	36.000,00	0,16
Beban Jasa Tenaga Supir	20.724.000,00	20.688.000,00	36.000,00	0,17
Beban Jasa Pengukuran Tanah	0,00	79.431.600,00	(79.431.600,00)	(100,00)
Beban Tagihan Telepon	0,00	22.764.254,00	(22.764.254,00)	(100,00)
Beban Tagihan Listrik	36.447.227,00	28.429.660,00	8.017.567,00	28,20
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.113.592,00	0,00	24.113.592,00	100,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.790.277,00	5.939.557,00	(149.280,00)	(2,51)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.484.944,00	20.104.439,00	1.380.505,00	6,87
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.499.952,00	0,00	1.499.952,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	1.525.386,00	(1.525.386,00)	(100,00)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	12.900.000,00	(12.900.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Taman	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Beban Sewa Hotel	0,00	38.130.000,00	(38.130.000,00)	(100,00)



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	416.629.398,00	0,00	416.629.398,00	100,00
Beban Sosialisasi	4.500.000,00	81.600.000,00	(77.100.000,00)	(94,49)
Beban Bimbingan Teknis	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00
Jumlah	795.681.019,00	671.682.965,00	123.998.054,00	18,46

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp149.673.900,00 dan kenaikan sebesar Rp29.803.770,00 atau 24,86% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp119.870.130,00.

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.377.900,00	38.190.200,00	33.187.700,00	86,90
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Mesin Ketik	21.411.500,00	11.500.000,00	9.911.500,00	86,19
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.050.000,00	7.250.000,00	(1.200.000,00)	(16,55)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	4.100.000,00	(4.100.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.834.500,00	58.829.930,00	(7.995.430,00)	(13,59)
Jumlah	149.673.900,00	119.870.130,00	29.803.770,00	24,86

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp607.876.535,00 dan mengalami kenaikan sebesarRp129.920.275,00 atau 27,18% bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp477.956.260,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Perjalanan Dinas Biasa	467.397.451,00	380.134.410,00	87.263.041,00	22,96
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.045.500,00	97.821.850,00	35.223.650,00	36,01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.433.584,00	0,00	7.433.584,00	100,00
Jumlah	607.876.535,00	477.956.260,00	129.920.275,00	27,18



5.3.2.1.3Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2022 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2023 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp455.742.059,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp65.431.006,00 atau 16,76% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp390.311.053,00. Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Beban Penyusutan sebagai berikut:

JENIS BEBAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.247.056,00	155.824.083,00	66.422.973,00	42,63
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.040.287,00	162.040.287,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	71.454.716,00	72.446.683,00	(991.967,00)	(1,37)
Jumlah	455.742.059,00	390.311.053,00	65.431.006,00	16,76

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
- a. Adanya penyesuaian nilai buku pada asset sehingga mengakibatkan beban penyusutan bertambah;

b. Adanya penambahan aset dari hasil belanja modal sehingga mengakibatkan beban penyusutan bertambah dan berkurang;

5.3.2.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/ Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	2.625.000,00	2.704.500,00	(79.500,00)	(2,94)
Beban	(5.024.700.663)	(5.320.722.343,00)	296.021.680,00	(5,56)
Surplus/Defisit LO	(5.022.075.663,00)	(5.318.017.843,00)	295.942.180,00	(5,56)



5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	3.688.416.309,00	3.622.463.077,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.022.075.663,00)	(5.318.017.843,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	0,00	0,00
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.599.114.636,00	5.383.971.075,00
EKUITAS AKHIR	3.265.455.282,00	3.688.416.309,00

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp3.688.416.309,00;
2. Surplus/Defisit – LO senilai Rp5.022.075.663,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2023;
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.599.114.636,00 diperoleh dari Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) laporan Realisasi Anggaran (RLA) Tahun Anggran 2023;
4. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp3.265.455.282,00 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.

BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

Demikian secara singkat uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, sesuai dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023. Semoga Laporan Keuangan yang disajikan ini dapat digunakan sebagai acuan bahan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun berikutnya.

Pengguna Anggaran,



ATIE PIENI, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 198702 2 001